



Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya

Jovano Deivid Oleyver Palenewen

Universitas Palangka Raya

jovano.palenewen@fisip.upr.ac.id

Info Artikel

Dikirim 24 Februari 2023

Direvisi 3 April 2023

Diterima 4 April 2023

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara demokratis yang mensyaratkan adanya pemilu yang dijadikan sebagai ruang politik bagi masyarakat untuk menyatakan hak politiknya. Dalam prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memilih termasuk kelompok pemilih pemula. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi melalui sosialisasi politik kiranya dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat termasuk pemilih pemula. Siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya adalah komunitas mitra sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Mereka adalah generasi muda yang harus terlibat dalam agenda-agenda politik, termasuk dalam pemilu dan pilkada. Apabila berusia 17 tahun maka mereka bisa menggunakan hak pilih mereka baik dalam pemilu maupun pilkada dan mereka dikategorikan sebagai pemilih pemula. Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi politik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Palangka Raya.

Kata Kunci

Sosialisasi Politik; Pemilih Pemula; Palangka Raya

Abstract

Indonesia is a democratic country that requires elections to serve as a political space for the people to express their political rights. This principle emphasizes the importance of community participation in voting, including groups of first-time voters. Community service is one of the Tri Dharma of higher education through political socialization which can contribute to increasing community participation, including first-time voters. SMA Negeri 1 Palangka Raya students are a partner community for political socialization for first-time voters. They are the younger generation who must be involved in political agendas, including elections and local elections. If they are 17 years old, they

can use their right to vote both in elections and local elections and they are categorized as first-time voters. This community service has been carried out in the form of political socialization for beginner voters at SMA Negeri 1 Palangka Raya.

Keywords

Political Socialization; Beginner Voters; Palangka Raya

Pendahuluan

Agenda pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia sejak era reformasi. Bahwa pasca reformasi 1998 Indonesia terjadi perubahan sistem politik untuk mewujudkan negara lebih demokratis, yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Perubahan sistem politik di Indonesia memberi suasana baru dalam konstelasi politik untuk mewujudkan Indonesia lebih demokratis (Marijan, 2015).

Pemilu sebagai syarat secara prosedural bagi negara yang menganut demokrasi. Pasca reformasi, Indonesia sudah melaksanakan pemilu sebanyak 5 (lima) kali. Robert Dahl (1971) menyampaikan bahwa salah satu wujud negara yang memiliki sistem politik demokratis yaitu terdapat pemilu yang berkala. Agenda ini bukan sekedar prosedur dilaksanakan begitu saja, tetapi jauh lebih daripada itu mewujudkan pemilu yang berkualitas dengan prinsip secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu juga dengan agenda pilkada. Pasca reformasi arus desentralisasi sangat kuat, yang berimplikasi pada penguatan daerah otonom. Desentralisasi menjadi pilihan penting bagi Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Marijan bahwa desentralisasi dipilih untuk menciptakan efektifitas pemerintahan dan terwujudnya *good local democracy* (Marijan, 2015).

Kedua agenda di atas akan berhasil jika didukung dengan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik menjadi sebuah prinsip penting bagi negara Indonesia yang menganut demokrasi. Djafar (2015) menyampaikan eksistensi demokrasi dapat terlihat pada keterlibatan rakyat dalam memilih dan proses penentuan kebijakan. Arti kata setiap suara yang diberikan sangat bermanfaat dalam menentukan masa depan negara serta terwujudnya legitimasi baik dalam pemilu dan pilkada. Sehingga sebagaimana semangat dalam konstitusi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Akan tetapi dalam realitas politik terhadap praktek tingkat partisipasi politik masyarakat, ditemui sikap skeptis dan apatis dari masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terlebih khusus pada generasi muda yang masuk dalam kategori pemilih pemula.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, setiap pelaksanaan kedua agenda tersebut tingkat partisipasi politiknya rendah, dimana angka partisipasi politik selalu tidak mencapai target yang ditentukan secara nasional. Apalagi saat pilkada, hal ini

berkaca pada pilkada tahun 2005, 2010 dan 2015. Disinyalir beberapa penyebab yang menjadi rendahnya partisipasi politik secara khusus penggunaan hak pilih, yaitu sikap apatis dari generasi muda.

Siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya sebagian besar masuk kategori remaja. Dari segi umur ada yang belum 17 tahun dan ada juga yang sudah 17 tahun. Mereka diharapkan siap tampil untuk berpartisipasi. Sebagai generasi penerus bangsa, dimana mereka harus terlibat dalam setiap agenda-agenda politik baik dalam pemilu maupun pilkada. Apalagi ketika mereka berusia 17 tahun mereka dapat menggunakan hak politik mereka, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Ketika siswa memasuki usia 17 tahun dan serta mendapat hak pilihnya, mereka dikategorikan sebagai pemilih pemula. Akan tetapi persoalan yang terjadi, dari hasil pra observasi, siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya sangat skeptik dan pragmatis tentang agenda-agenda politik, termasuk pilkada. Hal ini disebabkan mereka minimnya edukasi serta informasi politik. Sehingga upaya edukasi serta sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif bagi mereka dalam berpartisipasi politik. Apalagi tahun 2020 Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan pilkada maka dibutuhkan partisipasi politik dari pemilih pemula.

Metode

Secara umum kegiatan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Palangka Raya tujuannya untuk memberi informasi politik, yang nantinya berdampak pada kesadaran politik bagi siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya terhadap partisipasi politik. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dibagi dalam dua tahap, yakni tahap kegiatan sosialisasi dan tahap pendampingan. Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam sosialisasi politik sebagai berikut:

Pertama, seminar sosialisasi politik. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan sosialisasi politik dalam bentuk seminar pada hari Jumat, 25 Oktober 2019, yang dimulai jam 07.00 WIB sampai jam 10.00 WIB di Aula SMA Negeri 1 Palangka Raya, dan yang menjadi pesertanya adalah siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya yang sudah memiliki hak pilih dan juga nantinya sebelum pilkada tahun depan sudah berusia 17 tahun. Dalam tahapan ini sangat penting dalam memberikan informasi politik supaya dalam pemberian materi ini bisa tersaji secara lengkap. Menjadi narasumber adalah pertama dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah dan yang kedua dari pihak akademisi yang memiliki kompetensi dalam ilmu politik dan pemerintahan. Dalam paparan menggunakan tayangan *power point* dengan pendekatan dialog yang dipandu moderator. Dalam tahapan ini tim menyiapkan souvenir bagi yang menjawab pertanyaan narasumber dan yang memberi pertanyaan sebagai stimulus dalam memahami materi sosialisasi. Sasaran yang dicapai dalam tahap ini adalah

peserta bisa memahami dengan benar tentang pentingnya partisipasi politik yang berintegritas.

Kedua, pendampingan fasilitator. Dalam tahapan ini mitra (pihak sekolah) serta pihak KPU Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama tetap mendampingi siswa sebagai pemilih pemula dengan memberikan informasi dalam setiap kesempatan baik di kegiatan-kegiatan sekolah bahkan melalui sosial media. Sehingga dalam tahapan ini siswa tidak putus informasi dalam melakukan upaya partisipasi politik.

Pembahasan

Sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan kepada seseorang, yang nantinya seseorang tersebut akan mendapat orientasi politik. Sebagaimana yang disampaikan Miriam Budiardjo, sosialisasi politik sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat (Budiardjo, 2008). Bentuk dari pelaksanaan sosialisasi politik berupa pendidikan politik, dimana terjadinya proses edukasi antara pihak satu kepada pihak lain. Ruang sosialisasi politik tidak dapat dibatasi, tergantung dari sasaran yang akan dilakukan sosialisasi politik. Proses ini diharapkan target sosialisasi memperoleh informasi-informasi politik bahkan pengetahuan politik sehingga dapat menentukan sikap politik.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh dosen pengajar Universitas Palangka Raya tujuannya untuk memberikan kesadaran politik kepada masyarakat khususnya siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya yang nantinya masuk kategori pemilih pemula untuk menentukan sikap politik. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya sikap apatis generasi muda terhadap politik. Kegiatan terfasilitasi dengan baik karena orang-orang yang melaksanakan sosialisasi memiliki kompetensi terhadap isu yang diangkat dan memiliki kapasitas keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Di antaranya ialah Jovano Deivid Oleyver Palenewen, S.IP., M.A, Anisa Pebrianti, S.I.Kom, M.Med.Kom dan Bhayu Rhama, ST., M.B.A.. Selanjutnya praktisi dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan berdasarkan rencana jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar. Kegiatan yang diawali dengan penyiapan konsep proposal kegiatan, selanjutnya menghubungi mitra sampai pada pelaksanaan dan pendampingan, serta secara administratif dalam penyusunan laporan akhir kegiatan. Secara khusus kegiatan pokok pengabdian yaitu pelaksanaan sosialisasi politik di SMA Negeri 1 Palangka Raya. Kegiatan ini berjalan dengan baik dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara pihak pengusul yaitu dosen Universitas Palangka Raya, SMA Negeri 1 Palangka Raya dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan:

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

Pertama, tahap koordinasi tim pelaksana kegiatan. Kegiatan ini dilakukan guna mempersiapkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana yang telah dijadwalkan dimana kegiatan meliputi: persiapan materi sosialisasi, perlengkapan yang dibutuhkan, membuat jadwal kegiatan, menghubungi mitra serta pembagian tugas dari tim pelaksana kegiatan. Ketua tim bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sedangkan anggota tim bertugas membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas lainnya berkaitan dengan sosialisasi politik.

Kedua, tahap koordinasi menghubungi mitra SMA Negeri 1 Palangka Raya. Pada bagian ini, kegiatannya adalah tim pengusul menghubungi dan berkunjung langsung ke SMA Negeri 1 Palangka Raya untuk menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang sekaligus membawa surat permohonan dan surat tugas dari tim pengusul kepada pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi politik bagi pemilih pemula kalangan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Palangka Raya, yang diakhiri dengan kesepakatan hari, tanggal dan jam pelaksanaan.

Ketiga, tahap koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini untuk menghubungi pihak KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemateri dalam sosialisasi politik di SMA Negeri 1 Palangka Raya. *Keempat*, tahap persiapan tim dalam pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini, tim mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi politik, baik tempat, administrasi, materi dan konsumsi. *Kelima*, tahap pelaksanaan sosialisasi politik. Kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi politik bagi pemilih pemula kalangan siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya di aula pertemuan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan dipersiapkan.

Keenam, tahap memberikan pendampingan informasi kepada pemilih pemula kalangan siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya yang bekerjasama dengan pihak sekolah dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. *Ketujuh*, tahap pembuatan laporan akhir kegiatan. Rencana kegiatan telah dilakukan sebagaimana dalam perencanaan kegiatan dan menyusun laporan akhir sebagai akuntabilitas kegiatan PKM.

Hasil PKM kepada siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya mendapat antusiasme dari kalangan siswa sebagai sasaran sosialisasi. Hal ini nampak ketika mereka memberi pertanyaan kepada narasumber terkait materi untuk memperoleh informasi politik. Apalagi materi yang disampaikan dengan topik yang menarik yaitu tentang pemilih pemula, pemilu dan politik uang.

Adanya pengabdian ini memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya berpartisipasi politik dalam suatu negara serta bagaimana menjadi pemilih yang berintegritas dalam menggunakan hak pilihnya dengan tidak terlibat dalam politik transaksional seperti politik uang dan kampanye hitam. Sebelum dilaksanakan PKM ini, siswa tidak terlalu memahami dengan dunia politik khususnya tentang informasi kepemiluan, bahkan mereka berasumsi bahwa pada prinsipnya politik itu kotor. Ketika mereka mendapat pemahaman dari kegiatan sosialisasi ini, mereka bersemangat untuk berkomitmen dalam ikut serta dalam kegiatan politik khususnya mau memilih. Selanjutnya antusias yang ada mereka bertanya tentang mekanisme mendaftar sebagai pemilih.

Partisipasi politik dari generasi muda sangat dibutuhkan dalam setiap agenda-agenda politik seperti pemilu dan pilkada. Agenda pemilihan ini akan berhasil jika seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan haknya termasuk pemilih pemula. Meski diketahui berdasar pengalaman pemilu 2019 jumlah pemilih pemula tidak signifikan, yaitu 2,5% dari jumlah keseluruhan pemilih tahun 2019. Pemilih pemula yang nantinya akan bergabung ke dalam pemilih milenial, diharapkan memberi optimisme dalam membangun peradaban politik yang ada di Indonesia. Dimana generasi muda bersikap kritis, terbuka dan inovatif dalam berpartisipasi politik. Kecanggihan terhadap penggunaan teknologi informasi dapat membangun saluran-saluran informasi politik yang valid dalam membangun kultur politik yang sehat.

Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma dari perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi politik kepada pemilih pemula dan yang menjadi mitra adalah SMA Negeri 1 Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemilih pemula yaitu siswa SMA Negeri 1 Palangka Raya dalam berpartisipasi politik. Secara keseluruhan kegiatan ini telah dilakukan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini meliputi koordinasi

tim pelaksana, koordinasi dengan pihak mitra, koordinasi dengan stakeholder, persiapan tim dalam sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendampingan serta pembuatan laporan akhir kegiatan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan dengan harapan mampu membawa kontribusi positif dalam pembangunan peradaban politik terlebih dalam mengembangkan kesadaran politik bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam setiap agenda-agenda politik sebagai wujud penerapan nilai-nilai demokrasi.

Referensi

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. (1971). *Polyarchy Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press.
- Djafar, M. (2015). *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marijan, K. (2015). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.